

Profil

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

PROVINSI SUMATERA BARAT 2022



Profil

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

PROVINSI SUMATERA BARAT 2022





PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROVINSI SUMATERA BARAT 2022

ISSN : 2723-1828
Nomor Publikasi : 13000.2342
Katalog : 4101032.13
Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 46

Naskah:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Ilustrasi Kulit:

Freepik

Sumber Gambar:

Freepik

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dicetak Oleh:

CV. Graphic Dwipa (cetakan I)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)



PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROVINSI SUMATERA BARAT 2022

Pengarah : Sugeng Arianto, M.Si

Penanggung Jawab : Mila Artati, S.ST, M.Stat

Editor : Riza Ulfina, S.ST
Ir. Yunimarlita
Rahmi Septia Putri, S.ST
Deswaty, S.ST

Penulis : Retno Lis Megawati, S.ST

Infografis : Retno Lis Megawati, S.ST

Gambar Kulit : Retno Lis Megawati, S.ST

Pengolah Data : Mila Artati, S.ST, M.Stat

<https://jurnal.hpsn.com>

KATA PENGANTAR



Publikasi “Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat 2022” adalah publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang komposisi dan struktur kependudukan, serta gambaran keadaan program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Sumatera Barat. Publikasi ini merupakan publikasi ke delapan sejak buku ini diterbitkan. Diharapkan dengan adanya data yang berkesinambungan, dapat memenuhi kebutuhan data para pengguna data.

Dalam publikasi ini disajikan data terkait beberapa indikator demografi dan piramida penduduk, informasi tentang tingkat partisipasi masyarakat, penggunaan metode kontrasepsi, dan ulasan pembangunan kependudukan dari sisi perencanaan keluarga. Publikasi ini berguna bagi pemerintah, peneliti, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami situasi demografi dan kebijakan keluarga berencana di Provinsi Sumatera Barat.

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini ada dua yaitu data struktur kependudukan bersumber dari data proyeksi penduduk 2020-2035 hasil Sensus Penduduk 2020 (pertengahan tahun) dan data mengenai Keluarga Berencana (KB) bersumber dari olahan data Susenas Maret 2022.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran dari pengguna data akan kami pertimbangkan untuk meningkatkan kualitas publikasi di masa akan datang.

Padang, Juli 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat


Sugeng Arianto, M.Si



DAFTAR ISI



Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Sistematika Penulisan	5
BAB 2. Metodologi	7
2.1 Sumber Data	9
2.2 Konsep dan Definisi	9
BAB 3. Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana	13
3.1 Profil Kependudukan Provinsi Sumatera Barat	15
3.2 Keluarga Berencana	18
BAB 4. Pembangunan Kependudukan	31
4.1 Pembangunan Kependudukan	33
4.2 Umur Kawin Pertama	34
BAB 5. Penutup	41
Daftar Pustaka	43



DAFTAR TABEL



Tabel 3.1.1	Beberapa Indikator Demografi Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	16
Tabel 3.2.1	Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, Wilayah Tempat Tinggal dan Golongan Pengeluaran di Provinsi Sumatera Barat, 2022....	24
Tabel 3.2.2	Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Alat/Cara Ber-KB di Provinsi Sumatera Barat, 2022	27
Tabel 3.2.3	Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan, Golongan Pengeluaran dan Alat/Cara Ber-KB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	29
Tabel 4.2.1	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	35
Tabel 4.2.2	Persentase Laki-laki dan Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di bawah 19 tahun menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	36
Tabel 4.2.3	Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di Bawah 19 Tahun dan Penggunaan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2022	38

DAFTAR GAMBAR



Gambar 3.1.1	Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	17
Gambar 3.2.1	Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Tidak Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	20
Gambar 3.2.2	Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	21
Gambar 3.2.3	Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Pernah/Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	22
Gambar 3.2.4	Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Kelompok Kapan Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir di Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	23
Gambar 4.2.1	Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di Bawah 19 Tahun Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan yang di Tamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	37
Gambar 4.2.2	Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di Bawah 19 Tahun dan Tidak/Pernah Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2022.....	38



BAB 1. PENDAHULUAN

<http://sumber.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke empat terbesar di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 berjumlah 270 juta. Jumlah penduduk yang besar menjadikan isu kependudukan adalah prioritas penting bagi Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu pembangunan berwawasan kependudukan, menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, memfasilitasi pembangunan keluarga, mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak 5,5 juta jiwa dan *Long Form* SP2020 menunjukkan angka fertilitas yang tercermin melalui *Total Fertility Rate* (TFR) masih cukup tinggi yaitu 2,46. Dengan struktur umur yang ada, Sumatera Barat telah memasuki bonus demografi (rasio ketergantungan dibawah 50) sejak tahun 2020. Hal tersebut merupakan momentum yang baik apabila bisa dimanfaatkan dengan baik. Namun, jika tidak didukung dengan fasilitas kesehatan yang memadai dan sumber daya manusia berkualitas, jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah dapat memicu masalah kependudukan. Sehingga strategi khusus perlu dikembangkan untuk menekan pertumbuhan penduduk yaitu program Keluarga Berencana (KB).

Program KB bertujuan untuk menekan pertumbuhan penduduk dan mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030. Dalam implementasinya pemerintah harus memiliki pemahaman dan tujuan yang sama sehingga permasalahan kependudukan dapat teratasi. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus melakukan penataan program kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas dan sejahtera (BKKBN Sumbar, 2022). Sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat “Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana” menempati urutan ke-16 dari permasalahan pembangunan daerah (Bappeda Sumbar, 2018).

Indikator kependudukan dan keluarga berencana yang akan dibahas adalah indikator demografi yang mencakup usia perkawinan pertama, prevalensi pemakaian alat kontrasepsi modern (*contraception prevalency rate*), pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh perempuan, *depedency ratio*, serta rata-rata umur perkawinan pertama.

1.2 Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan pokok penyusunan Publikasi “Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat 2022”, yaitu:

1. Mengetahui pembangunan kependudukan dilihat dari aspek kesehatan penduduk terutama dalam hal penggunaan alat KB dan pelayanan KB yang telah dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022.
2. Memonitor pravalensi KB yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

1.3 Sistematika Penulisan

Pembahasan utama dirinci ke dalam 5 (lima) bab sesuai tema besar profil statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penulisan.
- b. Bab II. Metodologi, berisi tentang ruang lingkup dan konsep/ definisi yang digunakan penulisan publikasi.
- c. Bab III. Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana menjelaskan informasi umum tentang profil demografi/ kependudukan serta partisipasi KB.
- d. Bab IV. Pembangunan Kependudukan menyajikan pembahasan mengenai hasil pembangunan kependudukan yang tercermin dari indikator umur perkawinan pertama.
- e. Bab V. Penutup, berisi ringkasan tentang kondisi kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Sumatera Barat secara umum.



BAB 2. **METODOLOGI**

<https://id.scribd.com/document/444444444>

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan dan penyusunan indikator kependudukan pada publikasi ini bersumber dari proyeksi penduduk 2020-2035 hasil Sensus Penduduk 2020. Data penghitungan dan penyusunan indikator Keluarga Berencana (KB) bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022.

2.2 Konsep dan Definisi

Pembahasan yang disajikan dalam indikator kependudukan dan keluarga berencana ini menggunakan metode analisis deskriptif baik menyangkut Provinsi Sumatera Barat maupun perbandingan antara daerah perdesaan dan perkotaan serta perbandingan antar jenis kelamin. Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini.

Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama duabelas bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari dua belas bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari dua belas bulan.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu.

Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam blok sensus yang sama, maka dianggap sebagai satu rumah tangga.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari enam bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama enam bulan atau lebih, atau kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama enam bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah enam bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari enam bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) adalah angka beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Beban Tanggungan Anak-anak (*Child Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia di bawah 15 tahun dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah jumlah penduduk yang diwakili oleh penduduk perempuan berumur 15-49 yang berstatus kawin.

Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*) adalah proporsi penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB atau pasangannya yang sedang menggunakan alat/cara KB terhadap jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun. Alat/cara KB yang dimaksud adalah baik alat/cara KB modern maupun yang tradisional.

Persentase Pernah Menggunakan Alat/Cara KB adalah proporsi penduduk perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah menggunakan alat/cara KB terhadap jumlah penduduk perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun.

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Berumur 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat/Cara KB adalah pasangan usia subur (PUS) berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat/cara KB terhadap jumlah pasangan usia subur berumur 15-49 tahun.

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) berumur 15-49 Tahun Menggunakan Alat/cara KB dan Pernah Berhenti adalah pasangan usia subur (PUS) berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat/cara KB dan pernah berhenti terhadap jumlah pasangan usia subur (PUS) berumur 15-49 tahun.

Usia Perkawinan Pertama adalah usia pertama kali laki-laki atau perempuan melakukan hubungan seksual pertama kali.

BAB III

PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

INDIKATOR DEMOGRAFI

102,18

Rasio Jenis Kelamin/
Sex Ratio

47,12

Rasio Ketergantungan/
Dependency Ratio

28,36

Rasio Tua Muda

PREVALENSI PEMAKAIAN ALAT KB

Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

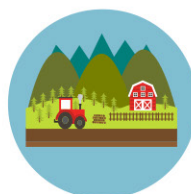
45,60%

perempuan kawin umur 15-49 tahun di Sumatera Barat menggunakan alat/cara KB



Perkotaan

41,35%



Perdesaan

49,63%

BAB 3

PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Profil Kependudukan Provinsi Sumatera Barat

Profil kependudukan atau gambaran demografi suatu daerah memberikan informasi penting tentang komposisi dan struktur penduduk pada suatu daerah sehingga perencanaan pembangunan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang ada. Jika suatu daerah memiliki struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia muda, seperti banyaknya penduduk dalam rentang usia produktif (15-64 tahun), maka penyerapan tenaga kerja dan perluasan pendidikan bisa menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Hal ini berarti penting untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi permintaan tenaga kerja dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di masa depan.

Selain itu, profil kependudukan juga dapat membantu perencanaan kesehatan. Misalnya, jika suatu daerah memiliki struktur penduduk dengan banyaknya kelompok usia muda, hal ini dapat mengindikasikan tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang relatif tinggi. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperhatikan pelayanan kesehatan dasar, seperti fasilitas persalinan yang aman, untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi serta meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi penduduk muda. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus masyarakat dalam berbagai bidang, seperti tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, sehingga dapat dirancang kebijakan dan program yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2020-2035 hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk laki-laki Provinsi Sumatera Barat lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan atau dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 102,18. Dengan kata lain setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Lebih lanjut rasio jenis kelamin pada umur 15-49 tahun di Sumatera Barat sebesar 104,63 menunjukkan pada umur muda dan produktif tidak banyak penduduk laki-laki yang bermigrasi ke luar. Apabila dijumpai rasio jenis kelamin pada umur 15-49 tahun yang nilainya di bawah 100, berarti ini mengindikasikan adanya migrasi keluar bagi penduduk laki-laki (*Columbia University, 2016*).

Angka rasio ketergantungan atau *dependency ratio* membandingkan kelompok umur non produktif dengan kelompok umur produktif diperoleh angka sebesar 47,12 persen (kurang dari 50 persen), artinya setiap 100 orang berumur produktif di Sumatera Barat menanggung sekitar 47-48 orang yang non produktif dan dengan kata lain Sumatera Barat telah memasuki bonus demografi, sebuah momen yang dapat mempercepat pembangunan jika dimanfaatkan dengan baik. Apabila kelompok umur muda (anak-anak) dibandingkan kelompok umur produktif diperoleh angka rasio ketergantungan untuk anak-anak sebesar 36,71 persen, artinya setiap 100 orang berumur produktif di Sumatera Barat menanggung sekitar 36-37 orang anak-anak.

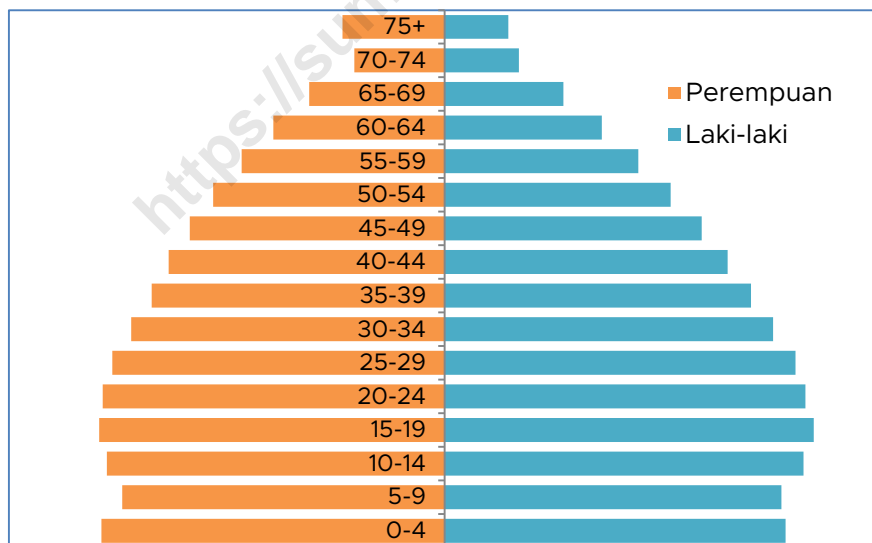
Tabel 3.1.1 Beberapa Indikator Demografi Provinsi Sumatera Barat, 2022

Indikator Demografi	Uraian
(1)	(2)
<i>Sex Ratio</i>	102,18
<i>Sex Ratio</i> Umur 15-49 tahun	104,63
<i>Dependency Ratio</i>	47,12
<i>Child Dependency Ratio</i>	36,71
Rasio Tua Muda	28,36

Sumber: Proyeksi Penduduk 2020-2035 Hasil SP2020

Dalam analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok umur muda (dibawah 15 tahun), kelompok umur produktif (15 – 64 tahun), dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas). Struktur umur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk umur muda sebanyak 40 persen atau lebih sementara kelompok umur tua kurang atau sama dengan 5 persen. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua apabila kelompok umur mudanya sebanyak 30 persen atau kurang sementara kelompok umur tuanya lebih besar atau sama dengan 10 persen (Tjiptoherijanto, 2001). Berdasarkan kategori-kategori tersebut terlihat bahwa telah terjadi proses transisi umur penduduk Sumatera Barat dari penduduk muda menuju penduduk tua (*ageing population*). Proses *ageing population* tersebut akan terus berlangsung dari tahun ke tahun.

Gambar 3.1.1 Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat, 2022



Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (pertengahan tahun)

Pergeseran struktur umur muda ke umur produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama

pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Sedangkan pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk umur lanjut.

Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan umur lanjut dari keluarga ke institusi. Apabila keadaan ini terjadi, maka tanggung jawab pemerintah akan menjadi bertambah berat (Tjiptoherijanto, 1995).

Dari gambar piramida penduduk (Gambar 3.1.1) terlihat bahwa struktur penduduk di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 cenderung sudah meninggalkan struktur penduduk muda. Ini ditunjukkan oleh bentuk piramida tersebut yang punya kecenderungan melebar di kelompok umur muda dan juga dari angka rasio tua muda penduduk Sumatera Barat tahun 2022 yang mencapai 28,36 persen. Sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah kelompok umur produktif (umur 15-64 tahun), yang mencapai 67,97 persen kemudian kelompok umur muda (umur 0-14 tahun) mencapai 24,95 persen dan kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 7,08 persen. Kelompok umur muda dan umur tua dapat dikelompokkan juga sebagai kelompok umur non produktif, yang mencapai 32,03 persen.

3.2 Keluarga Berencana

Kunci pengendalian jumlah penduduk adalah dari keluarga inti. Keluarga yang memiliki jumlah anak tidak lebih dari yang bisa dipelihara dengan baik, akan menjamin keluarga tersebut dari permasalahan kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemiskinan dan lainnya. Beberapa pengikut teori Malthus yang disebut *Neo Malthusianism* beranggapan bahwa untuk menghambat jumlah kelahiran tidak mungkin hanya mengandalkan moral restraint (berpuasa, penundaan perkawinan, penegakan moral). Sehingga disarankan metode *Birth Control* dengan penggunaan alat kontrasepsi yang akhirnya disebut *family planning* (Pandi, E.Srihartati, 1981).

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam penandatanganan berbagai instrumen hak asasi manusia. Indonesia

juga memiliki komitmen terhadap berbagai program pembangunan kesehatan dan keluarga berencana yang tertuang dalam Program Aksi *International Conference on Family Planning* (ICPD), Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) termasuk di dalamnya kemitraan global keluarga berencana yang dikenal dengan *Family Planning 2020* (FP2020) yang dicanangkan di tahun 2012.

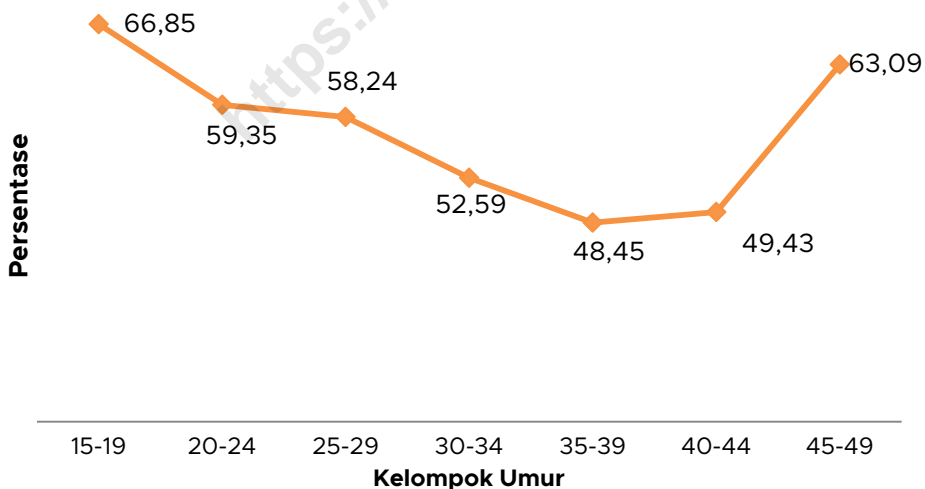
Family Planning 2020 bertujuan untuk mendukung hak-hak setiap perempuan untuk dapat menentukan, secara bebas, dan untuk diri mereka sendiri, apakah mereka ingin memiliki anak, kapan akan memilikinya, dan berapa jumlah anak yang ingin dimiliki. Pembatasan atau pengendalian jumlah anggota keluarga diprogramkan melalui pelaksanaan Keluarga Berencana (KB). KB telah banyak mengubah struktur kependudukan Indonesia, tidak hanya dalam arti menurunkan tingkat kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, juga mengubah pandangan hidup penduduk terhadap nilai anak serta kesejahteraan dan ketahanan keluarga (Bappenas, 2016). Sehingga pengendalian pertumbuhan penduduk dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan Keluarga Kecil Berkualitas dapat terwujud. Inti dari Keluarga Kecil Berkualitas dipahami sebagai pembatasan jumlah anggota keluarga sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga tersebut.

Pembangunan kependudukan sudah menjadi prioritas pembangunan nasional dan daerah. Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat, yaitu terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Salah satu misi yang dicanangkan di dalam mewujudkan visi pembangunan Sumatera Barat adalah “Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi”. Untuk mencapai misi tersebut, diuraikan dalam bentuk tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan misi tersebut ada 5 tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan dicanangkan di tujuan 5, yaitu: “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak”.

Untuk mengetahui kebijakan dan program yang tepat untuk pelaksanaan KB, perlu diketahui perilaku (*behavior*) dari target populasi. Di sini yang menjadi target populasi adalah pasangan usia subur, dalam bahasan berikut pasangan usia subur didekati dengan penduduk perempuan yang berstatus kawin dan berumur antara 15 hingga 49 tahun. Perilaku berbeda dapat dilihat dari tempat tinggal, jumlah anak yang dilahirkan hidup, pendidikan yang ditamatkan dan kelompok pengeluaran.

Informasi mengenai pasangan usia subur yang sudah tidak menggunakan alat/cara KB sangat bermanfaat bagi pembuat keputusan. Informasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi kenapa pasangan usia subur ini memutuskan untuk tidak lagi menggunakan alat/cara KB sehingga pembuat program dapat merancang program lainnya yang sekiranya lebih sesuai dan tepat sasaran.

Gambar 3.2.1 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Tidak Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2022

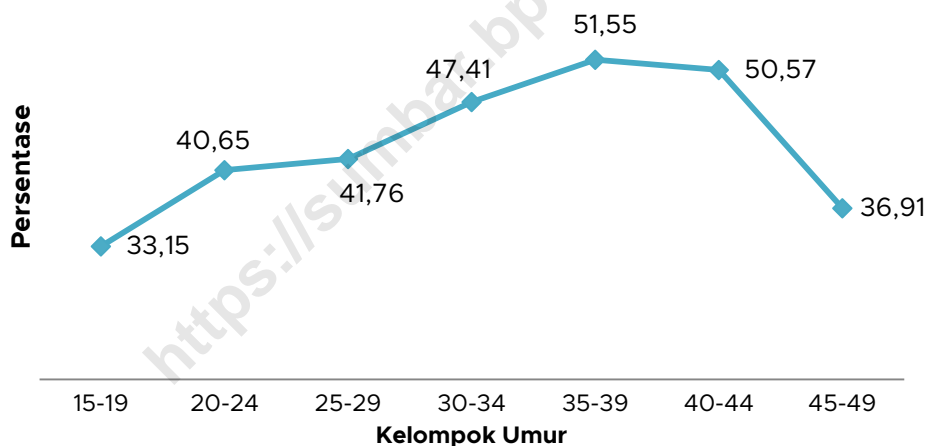


Sumber: Susenas Maret 2022

Dari Gambar 3.2.1 terlihat bahwa pola yang disajikan menurut kelompok umur cenderung membentuk huruf U. Pada kelompok umur muda persentase perempuan yang tidak menggunakan alat/

cara KB relatif besar dan semakin turun pada kelompok umur puncak masa reproduksi perempuan (kelompok umur 35-39 tahun). Ini dapat mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya umur masa reproduksi, pasangan usia subur ini merasakan keharusan untuk menggunakan alat/cara KB. Namun karena alasan lainnya membuat pasangan usia subur memutuskan tidak menggunakan atau memilih untuk tidak menggunakan alat/cara KB tertentu. Puncaknya berada pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun, kelompok umur di awal masa reproduksi, yaitu sebesar 66,85 persen.

Gambar 3.2.2 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Barat, 2022

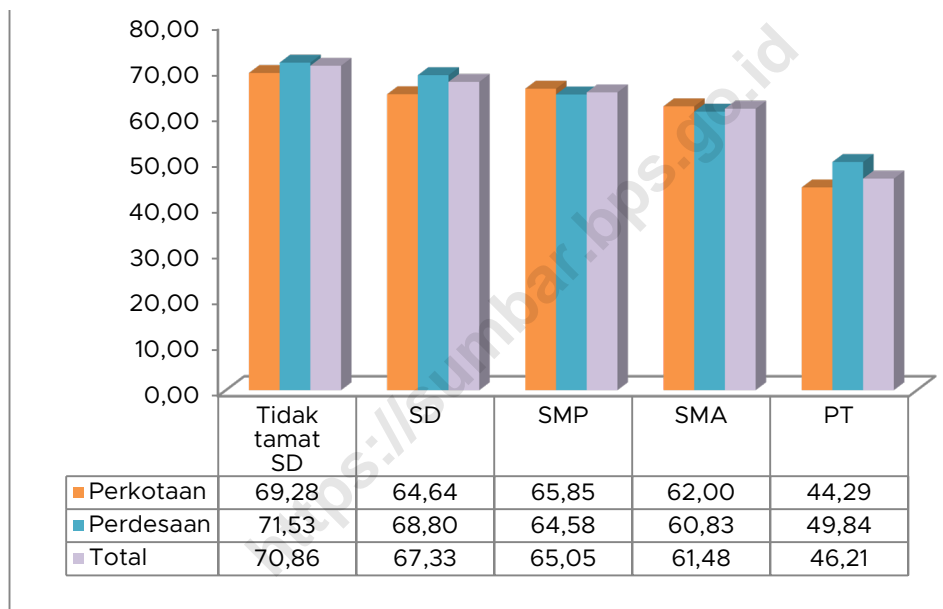


Sumber: Susenas Maret 2022

Gambar 3.2.2 menunjukkan perilaku pemakaian alat/cara KB diantara perempuan yang berstatus kawin menurut kelompok umur. Sesuai dengan teori pemakaian KB, gambar yang terbentuk adalah huruf U terbalik (K. Widyanti, 2011). Di kelompok umur muda pemakaian alat/cara KB relatif rendah karena di masa-masa awal reproduksi perempuan dan pasangannya berkeinginan untuk punya anak. Kemudian kebutuhan ber-KB akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya umur perempuan. Dapat dilihat dari gambar 3.2.2, puncak masa reproduksi perempuan berada di kelompok umur 35-39 tahun yaitu 51,55 persen.

Terdapat perbedaan perilaku penggunaan alat/cara KB menurut pendidikan yang ditamatkan. Secara total di Provinsi Sumatera Barat, semakin tinggi pendidikan perempuan kecenderungan untuk menggunakan alat/cara KB semakin rendah. Hal ini dapat dilihat dari gambar 3.2.3 berikut:

Gambar 3.2.3 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Pernah/Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2022

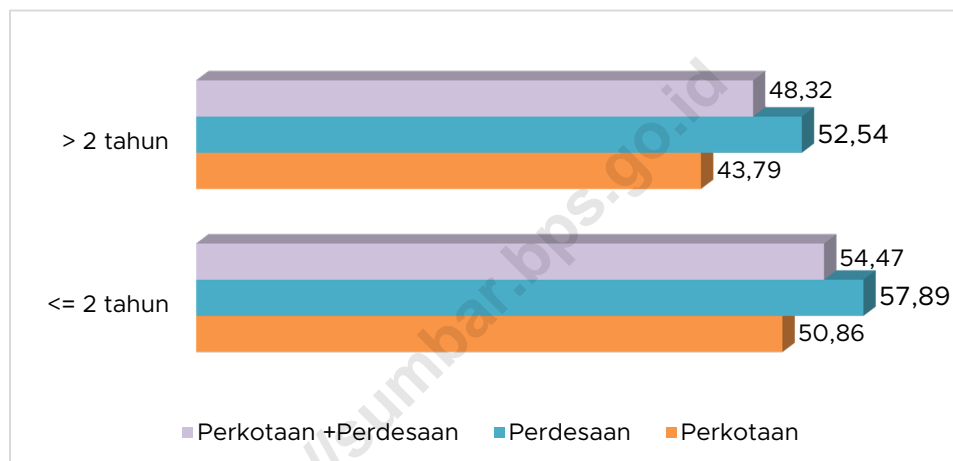


Sumber: Susenas Maret 2022

Dari Gambar 3.2.3 terlihat untuk Provinsi Sumatera Barat persentase tertinggi dari perempuan kawin yang pernah/sedang menggunakan alat/cara KB adalah perempuan yang tidak tamat SD yaitu sebesar 70,86 persen. Persentase terendah yang sedang/pernah menggunakan alat/cara KB adalah perempuan yang tamatan perguruan tinggi yaitu 46,21 persen. Pola perilaku pemakaian alat/cara KB ini juga terlihat berbeda menurut tempat tinggal. Jika dilihat persentase perempuan yang pernah/sedang menggunakan alat/cara KB paling rendah di daerah perkotaan dan perdesaan adalah perempuan dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, yaitu masing-masing sebesar 44,29 persen dan 49,84 persen. Sementara

persentase tertinggi penggunaan alat/cara KB untuk daerah perkotaan maupun perdesaan adalah perempuan yang tidak tamat SD yaitu sebesar 69,28 dan 71,53 persen.

Gambar 3.2.4 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Kelompok Kapan Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir di Provinsi Sumatera Barat, 2022



Sumber: Susenas Maret 2022

Perilaku menggunakan cara/alat KB antara pasangan usia subur yang melahirkan anak lahir hidup terakhir pada dua tahun lalu atau kurang (setelah tahun 2019) dengan yang lebih dari 2 tahun lalu (sebelum tahun 2019) juga menunjukkan pola yang berbeda. Kelompok pasangan yang melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) lebih dari dua tahun yang lalu relatif kecil dari kelompok pasangan yang melahirkan ALH kurang atau sama dengan dua tahun yang lalu. Hal ini mungkin adanya keinginan pasangan tersebut untuk segera memiliki anak. Ketika pasangan baru dua tahun yang lalu atau kurang melahirkan ALH, persentase penggunaan alat/cara KB lebih besar. Hal ini kemungkinan setelah memiliki anak, pasangan usia subur ingin mengatur jarak kelahiran anak. Pola ini terjadi baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 3.2.1 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB, Wilayah Tempat Tinggal dan Golongan Pengeluaran di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Wilayah Tempat Tinggal / Golongan Pengeluaran	Status Penggunaan Alat/Cara KB	
	Prevalensi Pemakaian KB (CPR)	Tidak
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	41,35	58,65
40 % terendah	47,69	52,31
40 % sedang	44,45	55,55
20 % tinggi	29,89	70,11
Perdesaan	49,63	50,37
40 % terendah	52,61	47,39
40 % sedang	50,30	49,70
20 % tinggi	38,72	61,28
Perkotaan + Perdesaan	45,60	54,40
40 % terendah	50,64	49,36
40 % sedang	47,47	52,53
20 % tinggi	33,02	66,98

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 3.2.1 menyajikan status penggunaan alat/cara KB menurut wilayah tempat tinggal dan status ekonomi rumah tangga. Pada tabel tersebut terlihat bahwa prevalensi pemakaian KB atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) berbanding terbalik dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Sejalan dengan itu semakin tinggi status ekonomi rumah tangga tersebut kecenderungan untuk tidak menggunakan alat/cara KB juga semakin meningkat. CPR dari rumah tangga dengan golongan pengeluaran tinggi sebesar 33,02 persen, sementara yang berasal dari rumah tangga dengan golongan pengeluaran sedang dan rendah masing-masing sebesar 47,47 persen, dan 50,64 persen. Terlihat juga bahwa lebih dari separuh atau sebesar 66,98 persen golongan pengeluaran tinggi tidak menggunakan KB.

Dilihat menurut tipe daerah, terdapat pola yang sama. Baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, semakin tinggi golongan pengeluaran, semakin rendah angka CPR dan semakin tinggi angka tidak menggunakan KB. Hal tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam apakah pasangan yang berasal dari golongan pengeluaran tinggi tidak ingin ber-KB. Sehingga konsekuensinya angka kelahiran tinggi berasal dari rumah tangga berpengeluaran tinggi. Jika hal ini memang terbukti maka program KB lebih tepat difokuskan kepada kelompok ini.

Jika dilihat secara keseluruhan, prevalensi pemakaian KB di daerah perkotaan cenderung lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan dengan masing-masing angka CPR adalah 41,35 persen untuk perkotaan dan 49,63 persen untuk daerah perdesaan. Hal ini mengindikasikan masih banyak wanita yang berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin tidak menggunakan alat/cara KB untuk menunda atau mencegah kehamilan sehingga hal ini akan dapat menjadi salah satu faktor pemicu tingginya tingkat kelahiran di daerah perkotaan.

Para pembuat kebijakan, pengelola program, dan peneliti sangat tertarik dengan informasi mengenai pengetahuan, sikap, dan praktek KB. Pengenalan terhadap metode kontrasepsi merupakan salah satu syarat dalam mengadopsi pengaturan fertilitas. Informasi mengenai metode kontrasepsi telah disosialisasikan melalui berbagai jenis media massa sejak dimulainya program keluarga berencana di Indonesia pada tahun 1971. Selain itu informasi mengenai tingkat penggunaan kontrasepsi (prevalensi kontrasepsi) juga penting untuk mengukur keberhasilan Program Keluarga Berencana. Ada berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, baik dengan metode tradisional maupun modern.

Dalam Susenas Maret 2022, metode penggunaan alat/cara kontrasepsi dikelompokkan menjadi 12 kategori, yaitu: sterilisasi wanita (medis operasi wanita/MOW), sterilisasi pria (medis operasi pria/MOP), pil, alat kontrasepsi dalam rahim/*intra uterine device* (AKDR/IUD/spiral), suntik, susuk/implant, kondom pria, intravag/diafragma/kondom wanita, menyusui alami (metode *amenorrhea*

laktasi/MAL), pantang berkala/kalender, dan metode lainnya.

Sampai saat ini, cara kontrasepsi yang ideal belum ada. Kontrasepsi ideal itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) dapat dipercaya; 2) tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan; 3) daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan; 4) tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan koitus; 5) tidak memerlukan motivasi terus menerus; 6) mudah pelaksanaannya; 7) murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 8) dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan.

Untuk keperluan analisis, alat/cara kontrasepsi dikelompokkan menjadi dua kategori yakni alat/cara modern dan tradisional. Alat/cara modern meliputi: sterilisasi wanita (medis operasi wanita/MOW), sterilisasi pria (medis operasi pria/MOP), pil, alat kontrasepsi dalam rahim/intra uterine device (AKDR/IUD/spiral), suntik, susuk, kondom pria dan intravag/diafragma/kondom wanita. Sedangkan alat/cara tradisional meliputi menyusui alami, pantang berkala/kalender, senggama terputus, urut/pijat, dan jamu/herbal.

Persentase wanita yang berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin sedang menggunakan alat/cara KB baik metode modern maupun tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan menurut wilayah tempat tinggal dapat dilihat pada Tabel 3.2.2. Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat/cara kontrasepsi dengan metode modern tercatat sebanyak 97,27 persen dan sisanya 2,73 persen menggunakan metode tradisional. Kelompok perempuan kawin usia subur baik yang tinggal di daerah perdesaan maupun perkotaan lebih banyak menggunakan alat/cara kontrasepsi metode modern dengan persentase 96,39 persen untuk perkotaan dan 97,97 persen untuk perdesaan.

Terlihat pada Tabel 3.2.2, penggunaan alat/cara KB menggunakan metode suntikan merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh perempuan kawin umur 15-49 tahun yaitu

sebanyak 45,15 persen. Selain dengan cara suntikan, penggunaan alat KB modern dengan susuk KB/implan menjadi pilihan kedua terbanyak. Jika dilihat menurut wilayah, penggunaan alat/cara KB modern tiga terbanyak di daerah perkotaan adalah suntikan, IUD/AKDR/spiral dan pil. Sedangkan di daerah perdesaan penggunaan alat/cara KB terbanyak adalah suntikan, susuk KB/implan, dan pil.

Tabel 3.2.2 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Alat/Cara Ber-KB di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Alat/Cara KB	Wilayah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Strerilisasi Wanita	8,14	4,58	6,15
Strelisasi Pria	0,94	0,45	0,67
IUD/AKDR/Spiral	15,16	6,32	10,22
Suntikan	39,15	49,88	45,15
Susuk KB/Implan	10,88	15,77	13,61
Pil	11,69	12,22	11,98
Kondom Pria	10,21	8,75	9,39
Kondom Wanita	0,22	0,00	0,10
Metode Menyusui Alami	0,83	0,16	0,46
Pantang Berkala/Kelender	2,06	1,27	1,62
Lainnya	0,72	0,60	0,66

Sumber: Susenas Maret 2022

Penggunaan alat/cara KB modern yang kurang diminati perempuan kawin usia subur adalah kondom wanita, tercatat hanya sebesar 0,10 persen. Jika dilihat pada alat/cara KB tradisional, metode pantang berkala/kelender lebih diminati dibandingkan metode tradisional lainnya.

Dalam memilih penggunaan alat/cara KB yang sesuai dengan kondisi tubuh kita dibutuhkan pengetahuan dan komunikasi dengan

suami dan tenaga medis. Menurut Donald J Bogue (K. Widyanti, 2011), terdapat rintangan berkomunikasi dalam KB, diantaranya:

- a. Perasaan takut bahwa kesehatan akan terganggu karena terlalu lama pakai pil, IUD atau alat kontrasepsi.
- b. Perasaan takut akan akibat sampingan sementara karena pakai pil, IUD atau alat kontrasepsi.
- c. Perasaan takut tanpa alasan terhadap metode vasektomi.
- d. Kurangnya komunikasi suami-istri tentang ukuran besar keluarga ideal, jarak antar anak, metode kontrasepsi yang sebaiknya digunakan apabila mereka menjalankan KB.
- e. Kurangnya perhatian tentang perencanaan jarak anak di kalangan generasi muda.
- f. Pengaruh negatif dari peer group dan orang-orang lebih tua dan sebagainya.

Dari yang disampaikan oleh Bogue sepintas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan pengetahuan tentang alat/cara KB merupakan kunci keberhasilan pasangan untuk ber-KB. Upaya menjalin komunikasi dan mendapatkan pengetahuan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat yang melayani pemakaian alat/cara KB.

Penggunaan alat/cara KB masing-masing perempuan kawin dengan tingkat pendidikan dan tingkat pengeluaran yang berbeda-beda dapat dilihat pada Tabel 3.2.3. Proporsi penggunaan alat/cara kontrasepsi yang paling banyak digunakan pada wanita umur 15-49 tahun dengan tingkat pendidikan dibawah SMA/ sederajat adalah suntikan sebesar 46,84 persen dan 14,78 persen menggunakan susuk/implan. Sedangkan untuk perempuan kawin umur 15-49 tahun yang berpendidikan Perguruan Tinggi lebih memilih menggunakan suntikan (36,04%) dan IUD/AKDR/spiral (23,71%). Jika dilihat dari tingkat pengeluaran, perempuan kawin umur 15-49 tahun yang termasuk golongan pengeluaran rendah lebih memilih untuk menggunakan alat/cara KB suntikan dan susuk KB/implan. Kemudian perempuan kawin umur 15-49 tahun golongan pengeluaran sedang lebih memilih menggunakan alat/cara KB suntikan dan pil. Sedangkan perempuan kawin umur 15-49 tahun dari golongan pengeluaran

tinggi lebih banyak memilih menggunakan suntikan dan IUD/AKDR/spiral.

Tabel 3.2.3 Persentase Perempuan Kawin Umur 15-49 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan, Golongan Pengeluaran dan Alat/Cara Ber-KB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Alat/Cara KB	Tingkat Pendidikan		Golongan Pengeluaran		
	≤ SMA	PT	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Strerilisasi Wanita	6,23	5,69	5,53	6,10	8,00
Strelisasi Pria	0,42	1,98	0,42	1,12	0,12
IUD/AKDR/Spiral	7,71	23,71	7,47	9,79	18,99
Suntikan	46,84	36,04	47,60	45,93	36,26
Susuk KB/Implan	14,78	7,35	16,26	12,48	9,42
Pil	12,83	7,45	11,39	12,84	11,27
Kondom Pria	8,83	12,44	8,10	9,29	13,25
Kondom Wanita	0,06	0,30	0,12	0,10	0,02
Metode Menyusui Alami	0,42	0,68	0,69	0,26	0,36
Pantang Berkala/Kelender	1,27	3,49	1,74	1,50	1,58
Lainnya	0,61	0,87	0,69	0,60	0,73

Sumber: Susenas Maret 2022

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Rata-rata laki-laki di Sumatera Barat kawin pertama kali saat berumur **25-26 tahun**



Rata-rata perempuan di Sumatera Barat kawin pertama kali saat berumur **21-22 tahun**

Rata-rata umur kawin pertama di Sumatera Barat **23-24 tahun**

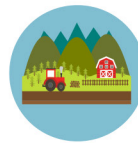
PERSENTASE PENDUDUK PERNAH KAWIN DENGAN UMUR PERKAWINAN PERTAMA <19 TAHUN



Laki-laki di Perkotaan **2,43%**



Laki-laki di Perdesaan **3,60%**



Perempuan di Perkotaan **17,18%**

Perempuan di Perdesaan **28,69%**

BAB 4

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

4.1 Pembangunan Kependudukan

Perubahan paradigma pembangunan kependudukan yang mencakup fokus pada kualitas penduduk memang telah membawa perubahan dalam pola pikir dan praktek kehidupan berkeluarga. Beberapa perubahan tersebut termasuk dalam perencanaan ekonomis terkait jumlah anak yang diinginkan oleh pasangan dan pergeseran median umur perkawinan pertama.

Saat ini banyak pasangan melakukan perencanaan ekonomis sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Hal ini dikarenakan pemahaman bahwa memiliki jumlah anak yang terlalu banyak dapat memberikan beban finansial yang signifikan bagi keluarga. Dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas, pasangan seringkali mempertimbangkan faktor-faktor seperti kestabilan ekonomi, pendidikan anak, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan untuk memberikan perhatian yang memadai kepada setiap anak. Dengan demikian, pasangan dapat mengatur jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga dapat memberikan perhatian yang optimal kepada setiap anak yang dilahirkan.

Selain itu, keinginan untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas juga telah berdampak pada perubahan sikap terhadap median umur perkawinan pertama. Di masa lalu, banyak individu yang menikah pada usia yang relatif muda, termasuk pada usia belasan. Namun, seiring dengan perubahan paradigma pembangunan kependudukan dan kesadaran akan pentingnya persiapan yang matang sebelum menikah dan memiliki anak, banyak pasangan sekarang cenderung menunda umur perkawinan pertama mereka.

Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri sebelum menikah, perkembangan

karier, kebutuhan untuk membangun kestabilan finansial, serta perubahan dalam norma sosial dan budaya. Pasangan sekarang lebih cenderung mencari kematangan emosional dan finansial sebelum memutuskan untuk menikah, sehingga median umur perkawinan pertama pun bergeser ke arah yang lebih matang.

Perubahan-perubahan ini menunjukkan adanya kesadaran yang lebih besar akan pentingnya mempersiapkan diri secara matang sebelum memutuskan untuk menikah dan memiliki anak. Dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi dan kualitas kehidupan, diharapkan keluarga-keluarga kecil berkualitas dapat terwujud, di mana setiap anak dapat mendapatkan perhatian dan dukungan yang optimal dari orang tua mereka.

Jumlah anak dan pergeseran umur perkawinan pertama perempuan dapat dipandang sebagai keberhasilan pembangunan dalam bidang kependudukan. Dengan kata lain keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) turut menentukan pencapaian pembangunan kependudukan. Di sisi lain, kegagalan program Keluarga Berencana dapat pula mengindikasikan kegagalan pembangunan kependudukan.

4.2 Umur Kawin Pertama

Hasil dari Susenas Maret 2022 dapat memberikan potret keberhasilan dan hal yang masih menjadi pekerjaan untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Rata-rata umur perkawinan pertama baik perempuan dan laki-laki di Sumatera Barat sudah jauh melewati usia yang disyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, di mana menurut undang-undang tersebut usia laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (sebelumnya untuk perempuan adalah 16 tahun).

Tabel 4.2.1 terlihat bahwa rata-rata umur perkawinan pertama di Sumatera Barat secara keseluruhan adalah antara 23-24 tahun. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, rata-rata umur perkawinan pertama laki-laki di Sumatera Barat adalah 25,91 tahun, lebih tinggi

dibanding rata-rata umur perkawinan pertama perempuan yaitu 21,69 tahun.

Tabel 4.2.1 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	26,60	25,27	25,91
Perempuan	22,56	20,87	21,69
Laki-laki + Perempuan	24,42	22,88	23,62

Sumber: Susenas Maret 2022

Sementara bila dilihat menurut wilayah tempat tinggal, baik daerah perkotaan maupun perdesaan menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu umur perkawinan pertama laki-laki lebih tinggi dibanding usia perempuan. Ini mengindikasikan hal yang baik terutama untuk perempuan karena umur perkawinan pertama di atas 20 tahun perempuan dianggap telah siap untuk bereproduksi karena apabila hamil di usia muda rahim belum siap dan membuat saluran kelahiran mudah pecah yang akibatnya dapat menyebabkan kematian saat melahirkan (BKKBN, 2013).

Pada umumnya, banyak anak yang sudah menikah mengalami putus sekolah. Hal ini dapat menyebabkan semakin sempitnya peluang perempuan muda memperbaiki pendidikan yang berimbas pada tingkat kesejahteraannya, sehingga dapat memperpanjang masalah sosial yang sudah ada (UNICEF, 2005). Dari laporan kajian perkawinan usia anak di Indonesia, bayi yang dilahirkan oleh perempuan dibawah umur punya resiko kematian lebih besar. Bayi tersebut juga punya peluang meninggal dua kali lipat sebelum mencapai usia satu tahun.

Berdasarkan data Susenas Maret 2022 pada tabel 4.2.2 terlihat bahwa prevalensi pernikahan laki-laki dan perempuan dengan umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun menunjukkan perbedaan signifikan. Persentase umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun untuk perempuan lebih dari 7 kali lipat persentase laki-laki. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, prevalensi pernikahan dibawah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan lebih besar di daerah perdesaan, dimana daerah perdesaan hampir dua kali daerah perkotaan.

Tabel 4.2.2 Persentase Laki-laki dan Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di bawah 19 tahun menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2022

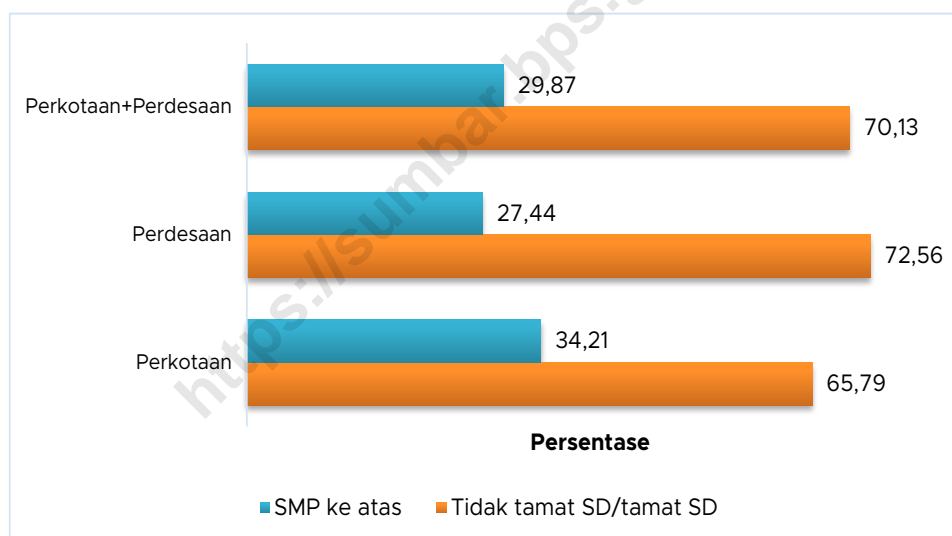
Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	2,43	3,60	3,03
Perempuan	17,18	28,69	23,12

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 4.2.2 menunjukkan Sumatera Barat memiliki angka perkawinan anak perempuan dengan umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun sebesar 23,12 persen. Persentase ini memiliki arti bahwa terdapat 23-24 dari 100 anak perempuan di Sumatera Barat melakukan perkawinan pertama saat berumur di bawah 19 tahun. UNICEF (2016) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dengan pendidikan. Anak yang menikah dibawah umur cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah. Dari Gambar 4.2.1, tingkat pendidikan perempuan yang umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun paling banyak adalah tidak tamat/tamat SD/ sederajat yaitu sebesar 70,13 persen. Tidak ada perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan, keduanya didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD/ sederajat atau bahkan tidak tamat.

Menyikapi fenomena perkawinan usia anak dalam penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dari satu pihak saja. Terdapat banyak faktor yang terlibat dalam menurunkan angka perkawinan usia anak ini, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Sebagai contoh, pada sektor kesehatan perlu adanya pemberian penyuluhan tentang penggunaan alat/cara KB terhadap perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia dibawah 19 tahun agar dapat menunda kehamilan sampai umur 20 tahun.

Gambar 4.2.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di Bawah 19 Tahun Menurut Wilayah Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan yang di Tamatkan di Provinsi Sumatera Barat, 2022



Sumber: Susenas Maret 2022

Jika dilihat dari penggunaan alat/cara kontrasepsi, Tabel 4.2.3 menunjukkan bahwa perempuan dengan umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun lebih dari separuh atau 51,15 persen dari mereka tidak atau pernah tetapi tidak sedang menggunakan alat atau cara KB. Berdasarkan wilayah, terdapat perbedaan penggunaan alat/cara KB dimana di daerah perkotaan lebih banyak (56,04%) yang tidak/ pernah menggunakan alat/cara KB, sedangkan di daerah perkotaan lebih banyak (51,47%) yang sedang menggunakan alat/cara KB.

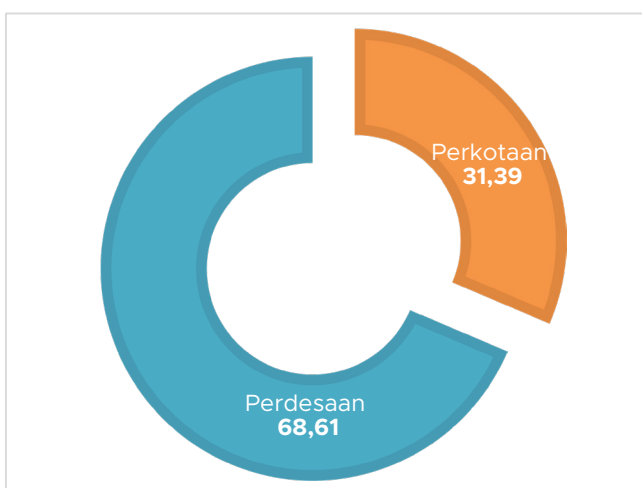
Tabel 4.2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di Bawah 19 Tahun dan Penggunaan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2022

Penggunaan Alat/ Cara KB	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sedang	43,96	51,47	48,85
Tidak/Pernah	56,04	48,53	51,15

Sumber: Susenas Maret 2022

Jika dipilah pada perempuan yang telah melakukan perkawinan pertama di bawah 19 tahun dan tidak /pernah menggunakan alat/cara KB, terlihat di daerah perdesaan sebesar 68,61 persen sedangkan di perkotaan tercatat 31,39 persen (Gambar 4.2.2). Jika hal ini tidak segera dikendalikan, dapat menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja.

Gambar 4.2.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Umur Perkawinan Pertama di Bawah 19 Tahun dan Tidak/Pernah Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat, 2022



Sumber: Susenas Maret 2022



BAB 5. PENUTUP

<https://sugilar.bps.go.id>

BAB 5

PENUTUP

Dari ulasan tentang kependudukan dan keluarga berencana yang telah dipaparkan sebelumnya, secara garis besar dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penduduk laki-laki di Sumatera Barat pada tahun 2022 lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, hal ini ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin atau *sex ratio* sebesar 102,18.
2. Struktur penduduk di Sumatera Barat cenderung sudah meninggalkan struktur penduduk muda. Ini ditunjukkan oleh bentuk piramida penduduk yang mempunyai kecenderungan melebar di kelompok umur muda. Selain itu angka rasio tua muda penduduk Sumatera Barat tahun 2022 juga mencapai angka 28,36.
3. Angka rasio ketergantungan penduduk atau *dependency ratio* Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 47,12 persen, yang artinya setiap 100 orang berumur produktif di Sumatera Barat menanggung sekitar 47-48 orang yang non produktif.
4. Terdapat perbedaan perilaku penggunaan alat/cara KB menurut pendidikan yang ditamatkan di Sumatera Barat dimana semakin tinggi pendidikan perempuan kecenderungan untuk menggunakan alat/cara KB semakin rendah.
5. Terdapat perbedaan perilaku penggunaan alat/cara KB menurut wilayah tempat tinggal di Sumatera Barat dimana prevalensi pemakaian KB daerah perkotaan (41,35 persen) lebih rendah daripada daerah perdesaan (49,63 persen).
6. Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat/cara kontrasepsi dengan metode modern sebesar 97,27 persen

dan sisanya 2,73 persen menggunakan metode tradisional. Jenis alat/cara KB modern yang paling diminati adalah suntikan.

7. Terdapat pola yang relatif sama pada umur perkawinan pertama menurut wilayah tempat tinggalnya, umur perkawinan pertama laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.
8. Masih adanya perempuan dan laki-laki yang umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun di Sumatera Barat pada tahun 2022 dimana untuk perempuan sebanyak 23,12 persen dan laki-laki sebanyak 3,03 persen.

<https://sumbar.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

<http://surbar.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Bappeda Sumatera Barat. 2018. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 1 Tahun 2018.

BKKBN. 2013. '4 Terlalu 3 Terlambat' Penyebab Naiknya Angka Kematian Ibu. Online [diakses pada 6 Juli 2022]. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/17/mxxxxn-4-terlalu-3-terlambat-penyebab-naiknya-angka-kematian-ibu>

BKKBN Sumbar. 2022. Kampung KB Sebuah Upaya Dalam Pembangunan Keluarga Indonesia. Online [diakses pada 6 Juli 2022] <https://sumbar.bkkbn.go.id/kampung-kb-sebuah-upaya-dalam-pembangunan-keluarga-indonesia/>

BKKBN. 2020. Umur Ideal untuk Menikah Menurut BKKBN, UU Perkawinan dan Islam. Online [diakses pada 6 Juli 2022] <https://www.desapematung.web.id/artikel/2020/1/9/umur-ideal-untuk-menikah-menurut-bkkbn-uu-perkawinan-dan-islam>.

BPS. 2010. Profil Indikator Pendidikan Indonesia 2009 (Kajian Indikator). Jakarta: CV. Nario Sari

BPS. 2010. Modul I Struktur Umur Penduduk (*Workshop* Hasil Olah Cepat SP2010). Jakarta

BPS. 2015. Pedoman Analisis Data Kependudukan dan KB hasil Susenas 2015. Jakarta: BPS

BPS Sumatera Barat. 2019. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2019. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS Sumatera Barat. 2018. Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat 2020. Hasil Susenas Maret 2019. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS. 2016. Sirusa (Sistem Rujukan Statistik)

BPS Sumatera Barat. 2022. Potret Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sumatera Barat: "Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia"

Christian, B dan Griffiths, T. 2016. *Algorithms to live By: The Computer Science of Human Decision. The New York Times Book Review, Picador.*

Ekarini, S,M,B. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. (thesis S2, unpublished)

K, Widyanti, M, S. 2011. Keluarga Berencana. (bahan ajar Pasca Sarjana), Lembaga Demografi FEUI.

Pandi, E.Srihartati, 1981. Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana Dan Program kependudukan, Penerbit: Pusat Pendidikan BKKBN, Jakarta.

Tjiptoherijanto, P. 2001. Majalah Perencanaan Pembangunan. Edisi 23

Tjiptoherijanto, P, 1995, Arah Kebijakan Makro Pemerintah dalam Mengantisipasi Pasar Global, makalah disampaikan pada Seminar Bisnis STIEIPWI. Jakarta, 31 Oktober 1995.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

UNICEF. 2005. *Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration.* [diunduh 10 Desember 2019]. https://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf.

UNICEF. 2016. *A fair chance for every child.* [diunduh 10 Desember 2019].https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf .

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No.48 Padang, Sumatera Barat 25135
Telp (0751) 442158, 442160
Homepage: <http://sumbar.bps.go.id>
Mailbox: sumbar@bps.go.id atau pst1300@bps.go.id

ISSN 2723-1828



9 772723 182233